



Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Mentari Puteri Pertiwi
Universitas Winaya Mukti

ABSTRACT

To gauge a village's level of development, one must look at its Village Original Income. As a supplementary revenue stream, village development is the overarching goal of the administration of this original revenue stream. Many industries throughout the world, from mom-and-pop shops to huge corporations, have been devastated by the current COVID-19 epidemic. Among these, one influences BUMDes, or businesses owned by residents of the village. In order to increase the original revenue of the village, this research aims to carry out economic business operations via business management, increase investment and productivity, and develop economic resources in order to earn a net profit. The study's qualitative methodology allows for the identification of issues pertaining to the workplace, organizations, society, youth, athletics, and the arts and culture. In order to verify data findings and carry out data analysis by summarizing and concentrating on significant aspects with research, data is reduced via classification, direction, and organization. The results of this investigation will be presented at scientific conferences and published in peer-reviewed journals. In addition, BUMDes provides a management development analysis, a SWOT analysis document, a development strategy document, and a strategy model for future planning and implementation.

ABSTRAK

Untuk mengukur tingkat pembangunan desa, kita harus melihat Pendapatan Asli Desa. Sebagai sumber pendapatan tambahan, pembangunan desa merupakan tujuan utama pengelolaan sumber pendapatan asli ini. Banyak industri di seluruh dunia, mulai dari usaha kecil-kecilan hingga perusahaan besar, yang terpukul oleh pandemi COVID-19 saat ini. Salah satunya adalah BUMDes, atau usaha milik warga desa. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa, penelitian ini bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, meningkatkan investasi dan produktivitas, serta mengembangkan sumber daya ekonomi agar dapat memperoleh laba bersih. Metodologi kualitatif penelitian ini memungkinkan identifikasi berbagai isu yang berkaitan dengan tempat kerja, organisasi, masyarakat, pemuda, atletik, serta seni dan budaya. Untuk memverifikasi temuan data dan melakukan analisis data dengan meringkas dan berkonsentrasi pada aspek-aspek penting dalam penelitian, data direduksi melalui klasifikasi, pengarahannya, dan pengorganisasian. Hasil penelitian ini akan dipresentasikan pada konferensi ilmiah dan dipublikasikan dalam jurnal peer-review. Selain itu, BUMDes menyediakan analisis pengembangan manajemen, dokumen analisis SWOT, dokumen strategi pengembangan, dan model strategi untuk perencanaan dan implementasi ke depan.

ARTICLE HISTORY

Submitted: 28/10/2024
Accepted: 10/12/2024
Published: 23/12/2024

KEYWORDS

Management Strategy, BUMDES, Village Original Income.

KATA KUNCI

Strategi Pengelolaan, BUMDES, Pendapatan Asli Desa, Produktivitas Perekonomian, dan Pengembangan Sumber Daya.



PENDAHULUAN

Era otonomi saat ini menempatkan otonomi daerah sebagai prasyarat utama untuk pelaksanaannya di bawah Orde Baru. Sebuah ide baru untuk pemerintahan desa diperkenalkan dengan disahkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2016. Tujuan dari undang-undang desa ini adalah untuk memberi desa lebih banyak kekuasaan sehingga mereka dapat mengurus penduduknya sendiri dan memanfaatkan sumber daya mereka sebaik-baiknya, dengan harapan bahwa hal ini akan mengarah pada masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan (Kusuma, 2018).

Desa adalah tingkat pemerintahan yang paling lokal dan intim dalam suatu negara, yang berfungsi sebagai penghubung penting bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dengan batas-batas yang ditentukan yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan pemerintahan daerah, proyek-proyek yang digerakkan oleh masyarakat, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan hak-hak yang telah ada sejak lama. Desa sebagai agen negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduknya secara menyeluruh dengan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi menjadi ancaman bagi kesejahteraan masyarakat desa, yang menjadi kendala bagi upaya pembangunan desa.

Untuk mengukur tingkat pembangunan desa, seseorang harus melihat Pendapatan Asli Desa. Menurut Kusuma dkk. (2018), pengelolaan pendapatan awal masyarakat ini dilakukan dalam konteks pengembangan desa sehingga dapat menghasilkan lebih banyak uang. Pengelolaan bisnis, investasi, produktivitas, dan pengembangan sumber daya semuanya berada dalam lingkup BUMDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengembangan sumber daya ekonomi dan pengumpulan laba bersih.

BUMDes merupakan organisasi yang dapat memfasilitasi komunikasi antara pemerintah desa dan penduduk desa; Kehadiran BUMDes akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pengelolaan aset desa oleh pemerintah. Selain itu, BUMDes berfungsi sebagai badan usaha penghasil Pendapatan Asli Daerah (PADes) dan penggerak ekonomi desa. Melihat kondisi desa dan BUMDes saat ini, maka diperlukan pendamping desa yang memiliki kemampuan manajemen dan apresiasi terhadap potensi desa yang melimpah (Mujiyono, 2017).

Pemerintah desa mendirikan BUMDes berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan BUMDes sebagai instrumen otonomi desa adalah membantu pemerintah dalam mendorong pengembangan potensi masing-masing desa sesuai dengan kapasitasnya. Tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berada di tangan pemerintah, yang bertugas melakukannya melalui Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Banyak industri di seluruh dunia, mulai dari toko kelontong hingga perusahaan besar, telah hancur akibat pandemi COVID-19 saat ini. Salah satu di antaranya adalah BUMDes, atau usaha milik warga desa. Salah satu faktor penyebabnya adalah BUMDes tidak menilai prospek masing-masing masyarakat sebagai tempat mendirikan



usaha. Alasan utama BUMDes tidak berjalan dengan baik adalah kurangnya arahan dan perencanaan dari pemerintah daerah. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat kami wawancarai.

KAJIAN PUSTAKA

Di antara peran manajerial yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan strategi adalah Tahap Perencanaan, yang mencakup identifikasi hasil yang diinginkan, menguraikan tindakan yang diperlukan, dan menetapkan tanggung jawab untuk pelaksanaannya (Mujiyono, 2017). Bagian penting dari menguraikan strategi yang akan dicapai sepanjang pelaksanaan tugas adalah proses pelaksanaan rencana; Agar suatu organisasi dapat mencapai tujuannya, Tahap Pengorganisasian melibatkan pembuatan kerangka kerja dan penugasan peran dan tugas kepada anggota. Tujuan perencanaan kegiatan adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan semua tugas yang dijadwalkan dengan menyusun dan mengatur setiap langkah proses secara hati-hati; Pada Tahap Implementasi, seorang pemimpin melaksanakan rencananya dengan menginspirasi bawahannya untuk bekerja sama dan memberikan semua yang mereka miliki dalam mengejar tujuan yang ditetapkan; Pengukuran, penilaian, dan perbandingan hasil pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, terlepas dari keakuratannya, merupakan Tahap Evaluasi. Untuk membuat pilihan, mengevaluasi situasi, dan menggunakan temuan pengukuran sambil mengingat tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, strategi perusahaan harus menunjukkan arah menuju tujuannya dengan memfasilitasi adaptasi, meningkatkan kinerja, meninjau kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta menerapkan dan mengevaluasi bisnis. Jika BUMDes ingin meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan manajemen perusahaan, mereka perlu menerapkan rencana manajemen ini.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dikelola masyarakat dan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa. Badan usaha ini didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan dan peluang desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2014. Proses dan kebutuhan pembentukan BUMDes diatur dalam peraturan ini.

Kerja sama, keterlibatan, emansipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan merupakan prinsip-prinsip praktik manajemen BUMDes. Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, mengolah potensi desa secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekonomi di daerah pedesaan (Singgih, 2015). Untuk mendukung temuannya, makalah ini mengutip sejumlah karya terdahulu yang relevan. Sebuah penelitian penting yang dilakukan oleh Agus dkk. (2019) menemukan bahwa BUMDes, sebuah organisasi ekonomi pedesaan yang otonom dan profesional, memiliki pendekatan manajemen kelembagaan yang sangat baik. Dengan membedah sumber data, penelitian ini mencermati data yang diperoleh. Untuk mengembangkan sumber daya lokal, kalangan BUMDes berkolaborasi dengan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pengelolaan BUMDes mengacu pada prinsip tetrapreneurship untuk mengembangkan usaha BUMDes dengan memanfaatkan potensi desa. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang mandiri, profesional, dan berdaya saing.



Pendapatan yang diperoleh desa dari hak asal usul dan kewenangannya dalam skala lokal disebut sebagai "pendapatan asli desa" berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Berbagai sumber pendapatan asli desa yang sah antara lain perusahaan desa, kekayaan desa, swadaya masyarakat, gotong royong, dan usaha sejenis lainnya (Nurchollis, 2011). Tujuan utama Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah memberdayakan setiap desa agar mandiri secara ekonomi dengan mengajarkan mereka untuk memanfaatkan potensi mereka secara penuh.

Untuk mendukung temuannya, makalah ini mengutip sejumlah karya terdahulu yang relevan. Sebuah penelitian penting yang dilakukan oleh Agung dkk. (2019) mengkaji kesiapan pemerintah desa dalam mendirikan BUMDes, dengan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan BUMDes sebagai pasar bagi usaha dan barang kreatif di masyarakat desa. Agar BUMDes dapat berfungsi dengan baik, anggotanya harus siap mencari sumber pendanaan selain APBDes dan ADD, serta mengenali potensi desa, menata organisasi, dan melatih pengurus yang handal.

Hafiez Sofyani dkk. (2019) menemukan bahwa membangun output produk masyarakat desa merupakan kunci pencapaian kinerja BUMDes. Temuan tersebut menyoroti pentingnya pendidikan, pelatihan, kolaborasi, soft skill, dan kemampuan dalam meningkatkan kinerja BUMDes. Di sini, pengelola BUMDes perlu memiliki pola pikir seseorang yang religius, bahagia dalam pekerjaannya, memiliki visi ke masa depan, dan bersedia bekerja keras untuk mencapai tujuan kinerja.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan Permendes No. 3 Tahun 2021 yang mengatur tahapan strategi pengelolaan BUMDES, yakni Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa, penelitian ini menggunakan analisis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dapat mengungkap berbagai permasalahan ketenagakerjaan, organisasi, sosial, pemuda, olahraga, serta kesulitan dalam bidang seni dan budaya.

Sumber informasi yang digunakan adalah sumber informasi primer dan sekunder. Tim peneliti mengumpulkan data primer melalui laporan langsung, observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan dokumentasi. Sebaliknya, data sekunder diperoleh dari kajian pustaka yang bersumber dari peraturan, buku, dan penelitian sebelumnya.

Pendekatan analisis data meliputi pengurangan data melalui klasifikasi, pengarahan, dan pengorganisasian sedemikian rupa sehingga memungkinkan verifikasi temuan data dan pelaksanaan ringkasan penelitian serta penekanan pada aspek-aspek yang relevan. Temuan penelitian akan lebih mudah dipahami jika kita dapat mengidentifikasi tema dan tren yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, memiliki lima dusun. Total ada sembilan RW di wilayah binaan KKNM UNLA, yakni Dusun 1 dan Dusun 2. Desa Ciapus berjarak satu kilometer dari kantor kecamatan, sedangkan Desa Ciapus berjarak sembilan kilometer dari ibu kota kabupaten. Dengan luas wilayah 288.242 hektare. Sumber daya lahan, air, ternak, dan manusia di Desa Ciapus terlihat jelas di sini sebagai kondisi atau potensi alam. Lahan, air, ternak, dan tenaga manusia merupakan komponen penting dalam kehidupan masyarakat desa. Ternak



menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal, sedangkan manusia menyediakan tenaga fisik berupa tenaga kerja manual. Bukti pemanfaatan air di Desa Ciapus yang kurang ideal, khususnya di bidang pertanian, menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik.

Pendataan dan wawancara dengan masyarakat menghasilkan kesimpulan bahwa optimalisasi pemanfaatan air oleh warga belum sepenuhnya terlaksana, dan beberapa sektor, khususnya sektor persawahan, masih belum merata. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kegagalan BUMDES dalam melakukan sosialisasi tentang permasalahan air. Salah satu wilayah yang sistem kekerabatannya mulai terkikis dan menyatu dengan sistem kekerabatan perkotaan adalah di wilayah utara Desa Ciapus yang berbatasan dengan ibu kota Kecamatan Banjaran. Di wilayah ini, perlu ada inisiatif dan upaya untuk memperkuat kearifan lokal agar dapat menumbuhkan kembali gotong royong dan kegiatan sosial desa lainnya, karena wilayah ini merupakan satu dari tiga wilayah yang kondisi sosial penduduknya terbagi-bagi. Hal ini berkaitan dengan strategi pelaksanaan BUMDes dan pengertian fungsi manajemen.

Setiap orang di desa memiliki BUMDes. Desa atau desa-desa dapat membentuk badan hukum yang disebut BUMDes untuk mengawasi berbagai badan usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, memberikan layanan, dan menjalankan berbagai jenis usaha lainnya untuk kepentingan masyarakat Desa secara keseluruhan. Kegiatan yang dikelola secara otonom oleh BUMDes adalah dalam sektor ekonomi dan/atau layanan publik. Sementara itu, Unit Usaha BUMDes merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan publik atas nama BUMDes dalam rangka mencapai tujuan dan melaksanakan tugasnya.

Tujuan pendirian BUMDes adalah mengelola kegiatan usaha perusahaan, meningkatkan investasi dan produktivitas, serta mengembangkan potensi desa. BUMDes juga melayani masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengelola lumbung pangan. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan desa dan memanfaatkan sumber daya ekonomi desa secara maksimal dengan memperoleh laba atau laba bersih. Tujuan lainnya adalah menciptakan nilai tambah dari aset desa, menciptakan ekosistem ekonomi digital, dan mengelola usaha. BUMDes Raksamanggala mengelola unit usaha sebagai berikut: Pengelolaan Air Bersih Desa, Gedung Serba Guna, Pasar Kaget dan Kolam Renang/Fasilitas Bermain Pasir Peti, serta bengkel dengan tujuh lokasi. Tiga dari lima unit usaha tersebut telah berhasil dikelola dan menghasilkan uang, namun masih perlu pembenahan baik dari sisi administrasi maupun operasional agar pembangunan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Jumlah konsumen meningkat 620 dari 580 pada tahun 2019 menjadi 620 pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kebutuhan sarana air bersih yang semakin meningkat, selain untuk mencuci dan mandi, air tersebut juga dapat digunakan sebagai air minum. Saat ini ketersediaan air bersih semakin berkurang, sehingga terbuka peluang untuk memulai usaha di bidang ini.

Upaya identifikasi data menjadi dasar dari komponen strategi internal dan eksternal. Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan BUMDes Desa Ciapus, pada tahap ini dilakukan analisis faktor. Kajian tersebut mempertimbangkan aspek internal dan eksternal. Untuk mengembangkan potensi desa, rencana ini bertumpu pada kinerja anggota BUMDes yang berkualitas. Hal ini pada gilirannya akan menghasilkan kas bagi masyarakat dan BUMDes, yang selanjutnya dimanfaatkan



untuk mengembangkan aset desa secara sistematis dan metodis. Dengan menggunakan analisis SWOT, buatlah permasalahan BUMDes sebagai langkah awal. Seperti terlihat pada tabel di bawah, elemen strategi internal dan eksternal BUMDes Desa Ciapus membentuk suatu matriks.

Tabel 2 Analisis Faktor Internal dan Eksternal BUMDes Desa Ciapus

Internal	Eksternal
Strength (Kekuatan) 1. Pengelolaan bisnis sudah berjalan dengan baik 2. Memiliki potensi desa yang dapat dikembangkan 3. Sarana dan Prasarana belum lengkap 4. Memiliki cukup modal yang besar	Opportunities (Peluang) 1. Perkembangan teknologi yang semakin maju untuk melancarkan proses bisnis 2. Pangsa pasar luas 3. Mendapat dukungan dari pemerintah desa. 4. Tidak mempunyai pesaing dalam produk bisnisnya
Weakness (Kelemahan) 1. Penempatan SDM tidak sesuai bidang dan kemampuan 2. Kurangnya pengetahuan dalam hal pengelolaan manajemen BUMDes 3. Masih ada masyarakat yang belum mengenal BUMDes di Desa Ciapus 4. Pelaporan dan Pencatatan keuangan masih manual dan tidak tersusun rapih.	Threats (Ancaman) 1. Belum mempunyai mitra bisnis 2. Belum mempunyai investor

Sumber : Penulis, 2022

Berdasarkan hasil analisis SWOT, BUMDes memiliki posisi yang baik untuk mengelola perusahaan mapan dengan prospek masa depan yang menjanjikan di desa tersebut. Namun, terdapat kelemahan utama pada sistem keuangan manual dan manajemen sumber daya manusia saat ini. Melalui pelatihan dan perbaikan sistem, kekuatan ini dapat digunakan untuk mengimbangi kekurangan dalam administrasi.

Langkah selanjutnya, setelah mengidentifikasi dan mengkategorikan strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal, adalah menghasilkan alternatif potensial dengan memanfaatkan analisis SWOT. Pertimbangan yang berkaitan dengan SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) telah diidentifikasi sepanjang konstruksi matriks. Berikut adalah analisis SWOT BUMDes Desa Ciapus.

Tabel 3 Matriks SWOT BUMDes Raksamanggala Desa Ciapus

S-O	W-O
1. Mengembangkan unit usaha baru dengan memanfaatkan potensi	1. Memperbaiki pengelolaan manajemen BUMDes dengan rutin



desa. 2. Meningkatkan pelayanan publik 3. Memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa	mengadakan pelatihan 2. Melakukan promosi ke masyarakat 3. Aktif memanfaatkan perkembangan teknologi
S-T	W-T
1. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah kota maupun swasta untuk menjadi mitra	1. Melakukan switching staff sesuai dengan kompetensi 2. Melakukan kunjungan studi banding ke BUMDes yang sukses mengembangkan usahanya. 3. Mengembangkan modal untuk pengembangan sumber daya. 4. Memperbaiki pengelolaan keuangan, dimulai dari pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan.

Sumber : Penulis, 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, BUMDes Desa Raksamanggala Ciapus perlu mendirikan unit usaha baru untuk memanfaatkan sumber daya desa, khususnya usaha air, meningkatkan pengelolaan BUMDes sesuai kompetensi, memperkuat pengelolaan keuangan dalam pencatatan, pengarsipan, dan pelaporan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai instansi untuk membantu pengelolaan usaha.

Jika pemerintah desa menginginkan pengelolaan BUMDes berjalan lancar dan PADesa berkembang, diperlukan strategi yang menjabarkan langkah-langkah yang harus ditempuh dan sumber daya yang harus disediakan agar rencana tersebut dapat terlaksana. Memulai BUMDes untuk mendirikan unit usaha baru merupakan langkah awal dalam meningkatkan PADesa. Hal ini dilakukan agar tujuan peningkatan PADesa dapat tercapai.

Menurut wawancara dengan Bapak Eman, pendiri BUMDes Desa Raksamanggala Ciapus yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2022, BUMDes menggunakan berbagai taktik, salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pertama, keterlibatan masyarakat sangat penting bagi pertumbuhan kota secara keseluruhan. Membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhannya merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat; 2. Bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai aset desa, seperti gedung serba guna, tempat parkir, dan air bersih, BUMDes Raksamanggala telah ditunjuk oleh dewan desa Ciapus untuk melaksanakan tugas ini. Meskipun demikian, BUMDes belum menetapkan kebijakan formal tentang pengelolaannya saat ini; BUMDes Desa Ciapus tengah menjalin berbagai kerja sama dengan pemerintah daerah, Tokopedia, dan Shopee; namun, mereka belum memperoleh pendanaan dari salah satu entitas tersebut. Upaya yang dilakukan oleh BUMDes dan pemerintah daerah selama ini menjadi satu-satunya sumber pendanaan; Dalam hal pengelolaan keuangan, BUMDes Desa Ciapus masih mengandalkan metode manual yang sudah mereka kenal. Namun, BUMDes harus mengubah pendekatannya dalam pencatatan keuangan mengingat kondisi teknologi saat ini masih banyak data keuangan yang tidak terorganisasi. Melihat berbagai



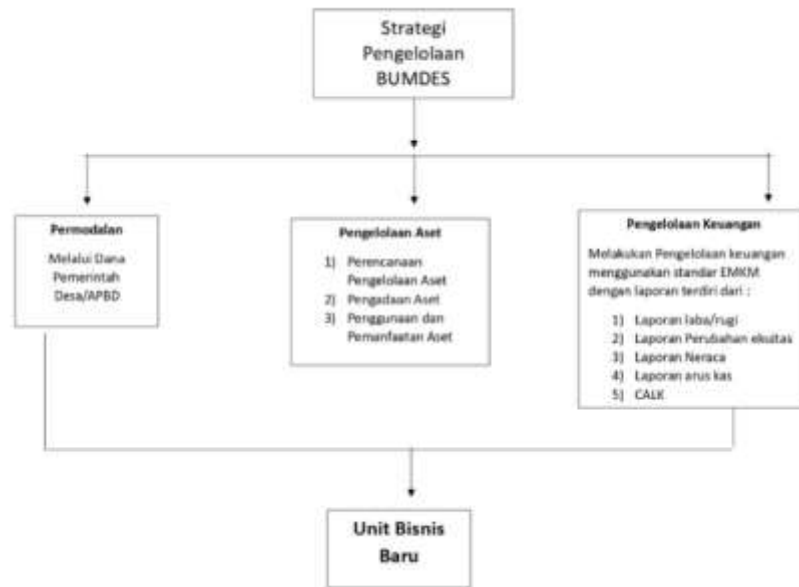
permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, jelas bahwa BUMDes Raksamanggala Desa Ciapus dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan aset yang lebih baik untuk membentuk unit usaha baru. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang lebih baik akan menghasilkan pendapatan desa yang lebih tinggi, yang dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif. Mengingat Pemerintah Desa secara konsisten memberikan dana kepada BUMDes Desa Ciapus dalam bentuk modal, maka dalam hal ini peneliti telah mengkaji semua teknik yang harus dilakukan BUMDes untuk mengelola aset dan keuangannya. Dengan tujuan untuk mewujudkan desa yang otonom, pemerintah memberikan dana awal melalui Program Desa Madani tahun 2012, dan lebih banyak dana yang disalurkan kepada Desa melalui mekanisme APBD.

Tujuan utama dari usaha komersial BUMDes adalah pengelolaan aset atau potensi desa yang dilayaninya secara efektif. Untuk mencapainya, BUMDes harus melangkah lebih jauh dalam proses regulasi untuk memperkuat kebijakan aset yang dimilikinya. Menyusun SOP pengelolaan aset BUMDes merupakan bagian dari pengelolaan aset desa. SOP ini harus didasarkan pada bagian Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur pengelolaan aset desa.

Karena mengandalkan pencatatan manual dan hanya menghasilkan catatan kas dasar, pengelolaan keuangan BUMDes Desa Ciapus kurang memadai. Untuk mendukung keberhasilan di BUMDes Desa Ciapus, penting untuk menyusun protokol untuk penyusunan akuntansi dan pelaporan, yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan yang biasanya meliputi perencanaan, pendokumentasian, dan pelaporan. Menyediakan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja merupakan tanggung jawab utama laporan keuangan di perusahaan sektor publik. Mengingat BUMDes Desa Ciapus saat ini hanya mampu melakukan pencatatan data secara manual, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pelaporan dan dokumentasi dengan menguraikan metode pemasukan data yang sesuai dengan persyaratan SAK EMKM.

Sesuai dengan SAK EMKM dan ciri-ciri yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perusahaan yang tidak memiliki tanggung jawab publik yang substansial dapat mengadopsi SAK EMKM sebagai standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri. Salah satu asumsi mendasar SAK EMKM adalah gagasan tentang badan usaha. Dengan demikian, agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan SAK EMKM, badan usaha yang dimaksud harus dapat membedakan antara kekayaannya sendiri dengan kekayaan pemiliknya, serta antara kekayaannya sendiri dengan kekayaan badan usaha lain.

Setelah pertemuan ini, peneliti menyajikan model strategi bagi BUMDes Raksamanggala untuk membantu pengelolaan perusahaan di masa mendatang. Model strategi yang disarankan adalah sebagai berikut:



Sumber
Penulis,

:
2022

Gambar 5 Strategi Pengelolaan BUMDes Raksamanggala Desa Ciapus

Dengan demikian, jelaslah bahwa strategi pengelolaan BUMDes Raksamanggala dapat dijalankan melalui cara-cara berikut: pengelolaan modal yang diperoleh langsung dari pemerintah desa; pengelolaan aset yang meliputi perencanaan pengelolaan aset baik yang sudah ada maupun yang potensial; dan pengelolaan keuangan yang dalam hal ini masih dilakukan secara manual. Ke depannya, BUMDes Raksamanggala dapat mengelola keuangannya sesuai standar akuntansi EMKM dengan menyusun lima laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jika BUMDes melaksanakan pengelolaan ini, maka akan memperkuat pendapatan awal desa dengan menciptakan usaha ekonomi baru yang akan mendatangkan lebih banyak uang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis sampai pada beberapa simpulan tentang bagaimana strategi pengelolaan BUMDes Raksamanggala dapat diimplementasikan. Di antaranya: Pengelolaan Aset, yaitu perencanaan pengelolaan aset baik yang sudah berjalan maupun yang akan datang; dan Pengelolaan Modal, yaitu penerimaan dana secara langsung dari Pemerintah Desa. Pengelolaan keuangan BUMDes Raksamanggala masih menggunakan cara manual. Dengan demikian, ke depannya BUMDes Raksamanggala dapat mengelola keuangannya sesuai dengan standar akuntansi EMKM dengan menyusun lima laporan, yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penelitian ini memang belum memberikan hasil yang maksimal, tetapi diharapkan dapat menjadi masukan bagi BUMDes lain agar dapat menerapkan strategi pengelolaan untuk menciptakan pola kerja dan usaha baru yang lebih kondusif.



DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Kholid dan Kulsum. 2021. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Guepedia.
- Candra. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ignatius, Eko. 2022. *Bunga Rampai*. Semarang: SCU Knowledge Media.
- Indriani, Milisa dan Istutik. 2018. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Intervening*. (9) 2. ISSN : 2086-2989.
- Fauzi, Moh. 2019. *Komputer untuk Akuntansi dan Bisnis*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Ferliani, Nurul. 2020. *Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Kompetensi Pengguna terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi*. (6) 1. ISSN: 2460-6561.
- Gurnita, Dhea., dkk. 2020. *Pengaruh Budaya Organisasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi*. (22) 2. ISSN: 1410-9263.
- Herwiyanti, Eliada. 2020. *Implementasi Standar Akuntansi Keuangan di UMKM*. Sleman: Deepublish
- Indra dan Ika Cahyaningrum. 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Sleman: Deepublish.
- Lestari, Kurnia dan Amri. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi Sia Sederhana Dalam UMKM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lubis, Muhammad. 2020. *Pengenalan Teknologi Informasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mardia. 2021. *Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ramadhan, Purnama. 2017. *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi*. (2) 4. E-ISSN 2581- 1002.
- Siregar, S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subagyo, Agus. 2020. *Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Mix Methods*. Malang: Inteligencia Media.
- Sudarmanto, Eko. 2021. *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudaryana, Bambang dan Agusiady. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sleman: Deepublish.
- Sugiarti., dkk. 2020. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang: UMMPress.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Triyaminanti, Nina. 2017. *Pengaruh Struktur Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi pada Pt.kai Daop 2 Bandung*. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, vol. 1, no. 1, pp. 92-104.
- Yanti, Mulyanti. 2017. *Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, vol. 1, no. 4, pp. 100-111.